



**RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019**

Sistematika RENJA menurut Permendagri 86 Tahun 2017

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

LANDASAN HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

SISTEMATIKA PENULISAN

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH

REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat Renja BPKAD tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Renja BPKAD tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

Persiapan penyusunan;
Penyusunan rancangan awal;
Penyusunan rancangan;
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah BPKAD;
Perumusan rancangan akhir; dan
Penetapan.

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2020 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses *top-down* dan proses *bottom-up* secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja BPKAD Tahun 2020 merupakan:

Pedoman bagi BPKAD dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta tujuan meraih predikat WTP Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategik (Renstra).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari atas (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, (3) Bidang

Anggaran, (4) Bidang Belanja (5) Bidang Aset dan Akuntansi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

Sekretariat, membawahi :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Anggaran, membawahi :

Sub Bidang Penyusunan APBD;

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.

Bidang Belanja, membawahi :

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

Sub Bidang Belanja Langsung;

Sub Bidang Perbendaharaan.

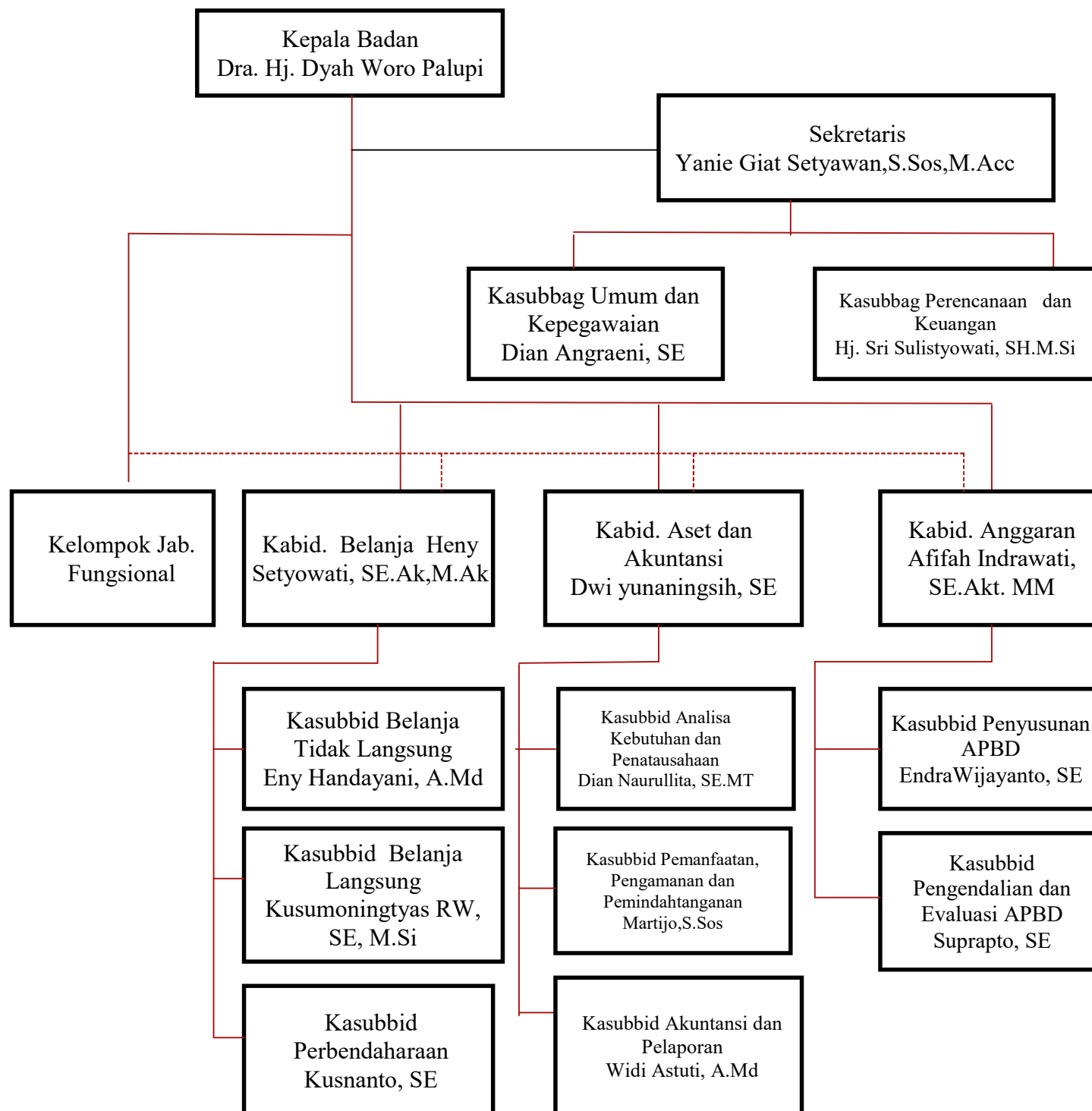
Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi:

Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;

Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan;

Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;

pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;

pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;

pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian yaitu :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan

rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, diantaranya :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran;

Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah;

Pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;

Penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah;

Penyusunan standarisasi harga;

Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang yaitu:

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memvalidasi anggaran kas dan penyiapan Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah.

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah, penyiapan pinjaman dan pengelolaan utang Daerah, penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah dan penyusunan standarisasi harga.

Bidang Belanja

Mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian program kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar;
- b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- c. pelaksanaan pengendalian Belanja Daerah;
- d. pengelolaan penggajian pegawai;

- e. pelaksanaan dan pemantauan atas penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang ditunjuk;
- f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pelaksanaan penyimpanan dan penempatan uang Daerah;
- h. pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Belanja Tidak Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja tidak langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Tidak Langsung, penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan, analisa realisasi pencairan dan Belanja Tidak Langsung dan penyiapan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran.

b. Subbidang Belanja Langsung

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja langsung meliputi penelitian kelengkapan dokumen permintaan pembayaran Belanja Langsung, penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung, rekapitulasi dan penyusunan laporan dan analisa realisasi pencairan Belanja Langsung.

Subbidang Perbendaharaan

Mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pencairan Surat Perintah Pencairan Dana, koordinasi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah di bank,

penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah meliputi penyiapan administrasi penyimpanan dan penempatan uang Daerah, pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, mempersiapkan pedoman dan petunjuk tentang administrasi keuangan Daerah, menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Aset dan Akuntansi

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai fungsi, diantaranya:

Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;

Penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi barang milik Daerah;

Pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;

Pelaksanaan pemindahtanganan;

Penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional;

Menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penunjukan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;

Pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;

Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;

Pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;

Pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;

Pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;

Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 3 Subbidang yaitu:

a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pengolahan data barang milik daerah, pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional, pelaksanaan proses pemindahtanganan.

c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penyusunan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyiapan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pelaksanaan sinkronisasi data keuangan dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan

Daerah, pengelolaan piutang/kerugian Daerah, penyiapan pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, penyiapan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, penyiapan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BPKAD tahun 2020 antara lain :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

MAKSUD DAN TUJUAN

Renja BPKAD tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sedangkan tujuan dari Renja BPKAD tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis BPKAD tahun 2016-2021;
Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;

Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;

Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Renja BPKAD tahun 2020 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2020. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kelima Kabupaten Kebumen meraih Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017 dan 2018.

Dengan penilaian dengan Opini WTP ini maka target IKU Kabupaten Kebumen berdasarkan RPJMD atau RKPD Tahun 2019 telah tercapai.

Untuk mempertahankan capaian tersebut sampai dengan akhir target RPJMD, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Membangun komitmen semua Aparat Sipil Negara dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Tertib penyampaian laporan keuangan.

Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan Keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedang *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019

Pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018.

Tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran sejumlah Rp.15.233.153.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sejumlah Rp.6.163.642.000,00 dan Belanja langsung sejumlah Rp. 9.069.511.000,00 untuk melaksanakan 8 program dan 38 kegiatan (anggaran setelah perubahan).

Realisasi total anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2018 adalah Rp.13.785.956.123,00 atau 90,50% dari total anggaran Rp.15.233.153.000,00 Realisasi anggaran belanja tidak langsung sejumlah Rp. 5.349.931.199,00 atau 86,80% dari jumlah anggaran belanja tidak langsung Rp.6.163.642.000,00. Realisasi anggaran belanja langsung sejumlah Rp.8.436.024.924,00 atau 93,02% dari jumlah anggaran belanja langsung Rp.9.069.511.000,00.

Realisasi belanja tidak langsung hanya mencapai 86,80% karena belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan realisasi tidak sesuai disebabkan karena terdapat karyawan yang mengalami purna tugas, meninggal dunia dan terdapat pejabat struktural yang mutasi ke OPD lain. Sedangkan realisasi belanja langsung hanya mencapai 93,02% karena adanya efisiensi terhadap penggunaan air listrik dan telpun, belanja dan sisa tender kegiatan yang dipihak ketigakan.

Berdasarkan data Laporan Realisasi APBD pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD), dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya hampir mencapai target yang telah ditentukan, pada tahun anggaran 2017 realisasi pendapatan daerah mencapai 98,94% dan tahun anggaran 2018 realisasi pendapatan daerah mencapai 99,72%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 data sampai dengan Juni 2019 realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 51,20%. Kontribusi pencapaian target pendapatan daerah didukung dari realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2017 mencapai 100,80% dan Tahun Anggaran 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target tercapai sebesar 101,36%, tetapi terhadap dana-dana perimbangan belum memenuhi target transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pada Tahun Anggaran 2017 baru mencapai 97,76%, dan pada

Tahun Anggaran 2018 baru mencapai 98,26% hal ini dikarenakan mendasari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, bahwa transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan memperhitungkan adanya SiLPA DAK Non Fisik dan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagai pengurang dana transfer DAK Non Fisik dan Dana Desa di tahun anggaran berjalan, sedangkan transfer DAK Fisik berdasarkan nilai kontrak yang sudah dientry pada *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN) dari Kementerian Keuangan RI, sedangkan transfer dana perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019 sudah mencapai 54,15%. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang syah dua tahun anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2017 realisasi sudah mencapai target sebesar 101,24% dan Tahun Anggaran 2018 realisasi mencapai target sebesar 102,80%, sedangkan pada tahun anggaran 2019 berdasarkan data sampai Bulan Juni baru mencapai target 46,11%.

Untuk komposisi Belanja Daerah berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2017 antara Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung sebesar 60,56% dibanding 39,44% dan Tahun Anggaran 2018 antara Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung dengan komposisi 61,47% dibanding 38,53%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 komposisi Belanja Tidak Langsung dibanding Belanja Langsung sebesar 60,03% dibanding 39,97%. Komposisi Belanja Tidak Langsung didominasi oleh Belanja Pegawai yang digunakan antara lain untuk pembayaran gaji Anggota DPRD, gaji Bupati/Wakil Bupati dan gaji ASN serta pembayaran tunjangan sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru dan tambahan penghasilan Non Guru serta insentif pemungutan PAD. Komposisi selanjutnya pada Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan penerusan Dana Desa; diikuti komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sehingga hal ini menyebabkan komposisi pengalokasian anggaran Belanja Tidak Langsung berbanding terbalik dengan Belanja Langsung Adapun komposisi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal dan Belanja Pegawai.

Adapun realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 mencapai 91,30% dan pada Tahun Anggaran 2018 mencapai 94,28%. Meningkatnya realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2018 tersebut tentunya akan

meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kebumen sejalan dengan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai bulan Juni 2019 baru terealisasi sebesar 29,75% dan diharapkan pada akhir tahun 2019 realisasi Belanja APBD minimal sama dengan tahun anggaran 2018 sebesar 94,28% atau bahkan bisa melampaui. Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2019 akan tercapai, manakala didukung kerja keras, kerja cerdas oleh semua unsur OPD dan dukungan Legislatif dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Terhadap target dan realisasi pendapatan daerah yang sudah dituangkan pada Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun anggaran 2019 (data sampai dengan Juni 2019) disampaikan sebagai berikut :

| URAIAN | TA.2017 | | | TA.2018 | | | TA.2019 | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------|-------------------|----------------------|--------|------------------|-------------------------|-------|
| | ANGGARAN | REALISASI | % | ANGGARAN | REALISASI | % | ANGGARAN | REALISASI s/d JUNI 2019 | % |
| PENDAPATAN | 2.739.317.507,00 | 2.710.364.060.029,00 | 98,94 | 2.647.019.919,000 | 2.639.814.864.397,90 | 99,72 | 2.805.865.491,00 | 1.436.482.312.168,00 | 51,20 |
| PAD | 437.343.224,000 | 440.859.524.813,00 | 100,80 | 347.309.619,000 | 352.047.092.281,90 | 101,36 | 401.172.210,00 | 189.036.065.076,00 | 47,12 |
| DANA PERIMBANGAN | 1.751.748.429,00 | 1.712.419.381.173,00 | 97,76 | 1.683.354.032,000 | 1.654.135.303.906,00 | 98,26 | 1.723.809.820,00 | 933.478.425.130,00 | 54,15 |
| LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH | 550.225.854,000 | 557.085.154.043,00 | 101,24 | 616.356.268,000 | 633.632.468.210,00 | 102,80 | 680.883.461,00 | 313.967.821.962,00 | 46,11 |
| BELANJA DAERAH | 2.880.818.112,00 | 2.630.271.307.685,34 | 91,30 | 2.812.902.414,000 | 2.652.047.980.376,00 | 94,28 | 2.960.999.393,00 | 881.010.808.564,20 | 29,75 |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.744.495.979,00 | 1.683.743.287.955,00 | 96,51 | 1.728.997.326,000 | 1.676.515.529.592,00 | 96,97 | 1.777.513.669,00 | 689.138.829.261,00 | 38,77 |
| BELANJA LANGSUNG | 1.136.134.933,00 | 946.528.019.730,34 | 83,31 | 1.083.905.088,000 | 975.532.450.784,00 | 90,00 | 1.183.485.724,00 | 191.871.979.303,20 | 16,21 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | (141.313.405,000) | 80.092.752.343,66 | | (165.882.495,000) | (12.233.115.978,10) | | (155.133.902,00) | 555.471.503.603,80 | |
| PEMBIAYAAN PENERIMAAN | 162.412.405,000 | 165.141.743.136,94 | | 177.632.495,000 | 225.675.495.480,60 | | 164.603.902,00 | | |
| PEMBIAYAAN PENGELUARAN | 21.099.000,000 | 21.099.000.000,00 | | 11.750.000,000 | 11.750.000.000,00 | | 9.470.000,000 | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 141.313.405,000 | 144.042.743.136,94 | | 165.882.495,000 | 213.925.495.480,60 | | 155.133.902,00 | | |
| SiLPA | 00 | 224.135.495.480,60 | | 00 | 201.692.379.502,50 | | 00 | | |

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran (LKD Kabupaten Kebumen TA.2017, 2018 dan Realisasi Sampai Bulan Juni 2019), data diolah

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun 2019, dan realisasi Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Terkelolanya surat menyurat | 72 | 24 | 24 | 24 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | | Penyediaan jasa | Terawatnya | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | kendaraan dinas/operasional | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya jasa pengelola kegiatan | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Perbaikan peralatan kerja | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|-------|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya Akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | Penunjang Administrasi Perkantoran | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 60 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 60 |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas ke dalam daerah | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Pengadaan paket kendaraan dinas/ operasional | 211 | 64 | 8 | 8 | 100% | 73 | 145 | 68,72 |
| | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pengadaan paket perlengkapan kantor | 342 | 327 | 2 | 2 | 100% | 2 | 331 | 96,78 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|---|--|--|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pengadaan paket peralatan gedung kantor | 217 | 56 | 13 | 100% | 49 | 118 | 54,37 |
| | | Pengadaan mebeleur | Pengadaan paket pengadaan mebeleur | 130 | 116 | 42 | 100% | 130 | 288 | 221,53 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor BPKAD | 6 | 7 | 1 | 100% | 1 | 9 | 150 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpeliharanya mebeleur kantor BPKAD | 550 | 105 | 94 | 100% | 34 | 233 | 42,36 |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan | Pengiriman aparatur untuk bimtek, workshop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah | 85 | 50 | 15 | 40% | 20 | 76 | 89,41 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Urusan Wajib | | | | | | | | |
| | | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | |
| | | Program pengembangan | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|------|---|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|-------|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | | data/informasi | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Tersusunnya renja, RKA, DPA, LKPJ/LPPD,LAKIP | 30 | 9 | 5 | 5 | 100% | 5 | 19 | 63,33 |
| | | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | |
| | | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan standar satuan harga | Tersusunnya peraturan Bupati tentang Indeks | 6 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 66,66 |
| | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup APBD | 12 | 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 10 | 83,33 |
| | | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD | Tersedianya rancangan Perda APBD dan Perbup PAPBD | 12 | 4 | 2 | 2 | 100% | 2 | 8 | 66,66 |
| | | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang | Tersusunnya raperda tentang | 16 | 6 | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 62,5 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|-------|
| | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | | pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | APBD | | | | | | | | |
| | | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset | 12 | 4 | 2 | 2 | 100% | 3 | 9 | 75 |
| | | Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah | Pengadaan papan nama aset daerah; terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda 4; terselesaikannya TPTGR | 318 | 8 | 53 | 53 | 100% | 54 | 115 | 36,16 |
| | | Pengelolaan Belanja Langsung | Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah dan pembinaan bendahara SKPD | 72 | 14 | 12 | 12 | 100% | 12 | 38 | 52,77 |
| | | Pengelolaan Belanja tidak Langsung | Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial | 72 | 14 | 12 | 9 | 75% | 12 | 35 | 48,61 |
| | | Penyusunan KUAPBD dan PPAS | Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan | 12 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 100 |

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018) | | | Target program dan kegiatan (Renja tahun 2019) (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja tahun 2018 (n-2) | Realisasi Renja Tahun 2018 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | | | | Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | 72 | 6 | 12 | 12 | 100% | 12 | 30 | 41,66 |
| | | | | | Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Sinkronisasi Data Keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ Fungsional SKPD | 72 | 24 | 12 | 12 | 100% | 12 | 48 | 66,66 |
| | | | | | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota | Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/ aset daerah | 5 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 80 |
| | | | | | Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah | Pembinaan dan evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan SKPD | 1206 | 414 | 198 | 198 | 100% | 198 | 810 | 67,16 |
| | | | | | Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial | Terlaksanannya pencairan bantuan keunagan/ bantuan sosial, hibah, pembiayaan | 720 | 240 | 120 | 120 | 100% | 120 | 480 | 66,66 |
| | | | | | Program Peningkatan | | | | | | | | | |

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan peraturan tersebut, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen

| NO. | INDIKATOR | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|-----------|-----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 1 | | | Opini BPK atas LKPD | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 2 | | | Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD | 93 | 94 | 95 | 96 | 94 | 52,05 | 95 | 96 | |
| 3 | | | Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 92,30 | 92,50 | 93,25 | 93,25 | 95,50 | 39,00 | 95,50 | 95,50 | Capaian Tahun 2019 realisasi Capaian sampai dengan Juni 2019/Semester I |
| | | | Capaian realisasi belanja | 90 | 90 | 90 | 90 | 92,46 | 26,60 | 90 | 90 | |
| | | | Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu | 80 | 80 | 83 | 83 | 90 | 30,66 | 83 | 83 | |
| | | | Capaian Realisasi Pendapatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,54 | 38,67 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | Jumlah SKPD yang mengirim SPJ Fungsional Tepat Waktu | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 162 | 198 | 198 | Tahun 2019 sudah gtidak ada lagi unit kerja/ UPT Dikpora, sehingga jumlah Opd/Unit di tahun 2019 sebanyak 171 |
| | | | Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, dinas mengacu pada visi Kabupaten Kebumen yaitu Menuju Kabupaten Kebumen yang modern, berkepribadian demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.

BPKAD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen menyelenggarakan fungsi:

penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

pengelolaan dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kebumen pada umumnya mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut meliputi :

Kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan yang menangani pengelolaan keuangan cukup memadai;

Koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan;

Adanya komitmen pengelola keuangan sehingga realisasi keuangan kegiatan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Komitmen semua ASN dan *stakeholder* / pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengefektifkan Sistem Penerapan Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

f. Perbaikan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

g. Perbaikan Kinerja Pengelola Keuangan, melalui Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, khususnya aparatur pengelola keuangan, maupun melalui upaya perbaikan sistem dan kebijakan akuntansi serta manajemen aset:

Mengadakan pelatihan/Bimtek mengenai pengelola keuangan pada SKPD

Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan

Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.

Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.

Tertib penyampaian Laporan Keuangan

Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Menerapkan mekanisme Transaksi Non Tunai (TNT) secara bertahap mulai tahun 2018.

Menerapkan pengelolaan keuangan berbasis TI dengan penerapan SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, Sidat Kedaton, SimGaji, SIPPAS, SIPATMA SP2D Online, Simbankeu dan SIBUBA.

Pilot project bagi OPD yang sudah dianggap mampu melakukan verifikasi SPJ secara mandiri dengan mengoptimalkan fungsi PPK SKPD guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Menindaklanjuti segera rekomendasi BPK dengan melibatkan OPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2019. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dan pada tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang sudah dicapai tersebut, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilaksanakan dalam mencapai RPJMD 2016-2021.

Adapun beberapa permasalahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

Ketidakakuratan/ketidakvalidan Laporan Keuangan SKPD

Sumber Daya Manusia Pengurus Barang OPD/Pengurus Barang kurang memiliki kompetensi di bidang Penatausahaan Aset.

Dari sisi data, data aset belum semua OPD tertata/belum tertib. Sedangkan dari sisi administrasi dan penyimpanan/pencatatan belum tertib.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di depan, maka isu-isu strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen belum optimal dikarenakan masih kurang tertibnya pencatatan tertib administrasi barang milik daerah;

Diterapkannya system akuntansi berbasis akrual yang masih membutuhkan penyempurnaan dalam sistemnya.

Rencana penyelesaian adalah :

Tertib penyampaian laporan keuangan;

Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);

Mengadakan pelatihan/Bimtek Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD;

Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan;

Melakukan Sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait;

Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset;

Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan berarti laporan keuangan Kabupaten Kebumen sempurna tanpa catatan. Ada beberapa hal atau isu strategis yang masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal penatausahaan aset/ada beberapa upaya yang dilakukan pada tahun 2019 untuk mempertahankan opini WTP antara lain :

Masih banyak tanah milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat sehingga diperlukan prioritas anggaran pensertifikatan tanah

Penerbitan aset-aset milik Pemerintah Daerah yang dipinjampakaikan kepada instansi vertikal

Proses hibah aset tetap dalam rangka penyerahan P3D ke pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tertib penyampaian laporan keuangan

Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Mengadakan pelatihan / bimtek mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD

Menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi terkait Surat Edaran Penyusunan Laporan Keuangan

Melakukan sinkronisasi data keuangan setiap bulan dengan OPD terkait.

Melakukan pendampingan ke tiap OPD dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendampingan penyusunan laporan aset.

Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, pengawasan obyek wisata dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan pasar. Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diamanatkan sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 juga perlu ditindaklanjuti dengan seksama terkait dengan penganggarnya yang harus dimasukkan dalam APBD Kabupaten Kebumen

REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Prioritas pembangunan tahun 2020 antara lain :

Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
Pemanfaatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;

Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

Penyesuaian Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Adapun review Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|----------------|-------------------------|--|--------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | |
| | Program Pengembangan data/informasi/statistik | | | | | | | | | | |
| 1. | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | BPKAD | Jumlah Data base pengelolaan keuangan dan aset daerah | 1 Dokumen | 18.000.000 | Program Pengembangan data/Informasi/statistik daerah | BPKAD | Tersusunnya data base pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah | 1 Dokumen | 21.175.000 | |
| | Program Pengembangan data/ Informasi | | | | | | | | | | |
| 2. | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | BPKAD | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah berupa Perubahan Renstra 2016-2021, Renja, Perubahan Renja, | 5 Dokumen | 28.500.000 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | BPKAD | Tersusunnya renja, RKA,DPA,LKPJ/ LPPD,LAKIP | 5 Dokumen | 35.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|--------------|-------------|---|-------|--|--------------|-------------|--|
| | | | RKA/DPA, LKPJ/LPPD dan LKJIP | | | | | | | | |
| | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyusunan Analisa Standar Belanja | BPKAD | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja | 1 Dokumen | 400.000.000 | | | | | | Di Renstra tidak ada, kegiata n baru merupa kan tindak lanjut Rencan a Aksi Penceg ahan Pember antasa n Korupsi |
| 4. | Penyusunan standar satuan harga | BPKAD | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang indeks Standarisasi Harga | 1 Dokumen | 81.250.000 | Penyusunan standar satuan harga | BPKAD | Tersusunnya Peraturan Bupati tentang indeks | 1 Dokumen | 105.000.000 | |
| 5. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | BPKAD | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup | 2 Dokumen | 420.000.000 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang | BPKAD | Tersedianya rancangan Perda APBD Dn Perbup APBD | 2 Dokumen | 480.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|-------------------|-------------|---|-------|--|-----------|-------------|--|
| | | | APBD | | | | | | | | |
| 5. | Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD | BPKAD | Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD | 2 Dokumen | 350.000.000 | Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan APBD | BPKAD | Tersedianya rancangan Perda PAPBD dan Perbup PAPBD | 2 Dokumen | 430.000.000 | |
| 6. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD | Jumlah dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD LKPD, Perda, Perbup dan Laporan Semesteran | 3 Dokumen | 370.000.000 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | BPKAD | Tersusunnya Raperda tentang APBD | 3 Dokumen | 410.000.000 | |
| 7. | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | BPKAD | Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset | 2 Dokumen | 445.000.000 | Peningkatan manajemen aset/ barang daerah | BPKAD | Tersedianya pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset | 2 Dokumen | 600.000.000 | |
| 8. | Pengamanan Aset/ Barang Milik Daerah | BPKAD | Jumlah pemasangan plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanda batas tanah pemda Dan Jumlah unit asuransi kendaraan | 50 Buah 3 unit | 248.000.000 | Pengamanan Aset/ Barang Milik Daerah | BPKAD | Pengadaan papan nama aset daerah; | 53 Buah | 899.300.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--|--------------|-------------|---|-------|--|--------------|---------------|--|
| | | | dinas yang terbayar | | | | | | | | |
| 9. | Penyusunan KUAPBD dan PPAS | BPKAD | Jumlah Dokumen KUA PPAS murni dan perubahan | 4 Dokumen | 158.000.000 | Penyusunan KUAPBD dan PPAS | BPKAD | Tersusunnya KUAPBD dan PPAS murni dan perubahan | 2 Dokumen | 239.580.000 | |
| 10. | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain daerah | BPKAD | Jumlah obyek intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | 3 Obyek | 94.000.000 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan lain-lain daerah | BPKAD | Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | 3 Obyek | 845.185.000 | |
| 11. | Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD | Jumlah bulan dilaksanakann ya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD dan Penatausahaan BOS dan BLUD | 12 Bulan | 229.000.000 | Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | BPKAD | Terlaksananya Sinkronisasi Data Keuangan SKPD dan Pengesahan SPJ fungsional SKPD | 12 Bulan | 332.750.000 | |
| 12. | Pengelolaan Belanja Langsung | BPKAD | Jumlah dokumen data penatausahaan keuangan daerah belanja langsung dan pembinaan bendahara OPD | 1 Dokumen | 845.000.000 | Pengelolaan Belanja Langsung | BPKAD | Tersedianya data penatausahaan keuangan daerah | 1 Dokumen | 1.115.000.000 | |
| 13. | Pengelolaan belanja tidak langsung | BPKAD | Jumlah dokumen pengelolaan gaji dan penerbitan | 1 Dokumen | 273.000.000 | Pengelolaan belanja tidak langsung | BPKAD | Pengelolaan gaji PNSD dan rekonsiliasi jumlah pegawai; | 1 Dokumen | 465.850.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|-----------|-------------|---|-------|--|-----------|-------------|--|
| | | | SP2D belanja tidak langsung | | | | | lancarnya pengelola hibah, bagi hasil, bantuan keuangan dan bantuan sosial | | | |
| | Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 14. | Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota | BPKAD | Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah | 2 Dokumen | 165.000.000 | Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota | BPKAD | Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan/aset daerah | 1 Dokumen | 175.000.000 | |
| 15. | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah | BPKAD | Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD | 198 OPD | 223.000.000 | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah | BPKAD | Pembinaan dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan SKPD | 198 OPD | 326.095.000 | |
| 16. | Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial | BPKAD | Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi | 120 SPM | 300.000.000 | Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial | BPKAD | Terlaksananya pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial, hibah, | 120 SPM | 646.505.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|----------|-------------|--|-------|--|----------|-------------|--|
| | | | hasil dan pembiayaan | | | | | pembiayaan | | | |
| | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | | | | | | | | | | |
| 17. | Pengendalian Kas Daerah | BPKAD | Jumlah bulan pengelolaan dana transfer APBD dan transfer daerah dengan capaian realisasi belanja | 12 Bulan | 255.000.000 | Pengendalian Kas Daerah | BPKAD | Rekonsiliasi Pelaporan | 12 Bulan | 360.000.000 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | |
| 18. | Penyediaan jasa surat menyurat | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat | 12 Bulan | 3.960.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | BPKAD | Terkelolanya surat menyurat | 12 Bulan | 6.988.000 | |
| 19. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan telekomunikasi air dan listrik | 12 Bulan | 200.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BPKAD | Terbayarnya rekening telekomunikasi, air dan listrik | 12 Bulan | 532.400.000 | |
| 20. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BPKAD | Jumlah bulan perawatan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 117.360.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BPKAD | Terawatnya kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 301.472.000 | |
| 21. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan jasa pengelola kegiatan | 12 Bulan | 407.898.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BPKAD | Terbayarnya jasa pengelola kegiatan | 12 Bulan | 465.850.000 | |
| 22. | Penyediaan Jasa | BPKAD | Jumlah bulan | 12 Bulan | 79.216.000 | Penyediaan Jasa | BPKAD | Tersedianya | 12 Bulan | 79.860.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|----------|-------------|--|-------|---|----------|-------------|--|
| | Kebersihan Kantor | | penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor dan jumlah bulan penyediaan honor petugas kebersihan | | | Kebersihan Kantor | | alat dan bahan kebersihan kantor | | | |
| 23. | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | 68.000.000 | Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | BPKAD | Perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | 103.818.000 | |
| 24. | Penyediaan alat tulis kantor | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | 12 Bulan | 60.000.000 | Penyediaan alat tulis kantor | BPKAD | Tersedianya alat tulis kantor | 12 Bulan | 99.825.000 | |
| 25. | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan penggandaan cetakan dan penjilidan | 12 Bulan | 50.000.000 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | BPKAD | Tersedianya kebutuhan penggandaan, cetak, jilid | 12 Bulan | 99.825.000 | |
| 26. | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 9.902.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BPKAD | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 19.965.000 | |
| 27. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 9.902.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BPKAD | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 19.965.000 | |
| 28. | Penyediaan makanan dan minuman | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan jamuan rapat dan jamuan | 12 Bulan | 120.000.000 | Penyediaan makanan dan minuman | BPKAD | Tersedianya jamuan rapat dan jamuan tamu | 12 Bulan | 159.720.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|----------|---------------|--|-------|---|----------|---------------|--|
| | | | tamu | | | | | | | | |
| 29. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | 150.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BPKAD | Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | 199.650.000 | |
| 30. | Penunjang Administrasi perkantoran | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan honor PTT | 12 Bulan | 19.500.000 | Penunjang Administrasi perkantoran | BPKAD | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 21.296.000 | |
| 31. | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | BPKAD | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan | 12.000.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | BPKAD | Terlaksananya akomodasi dan perjalanan dina ke dalam daerah | 12 Bulan | 19.965.000 | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | |
| 32. | Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional | BPKAD | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal | 34 unit | 3.306.590.000 | Pengadaan Kendaraan dinas/ Operasional | BPKAD | Pengadaan Paket kendaraan dinas/operasio nal | 43 unit | 7.140.000.000 | |
| 33. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | BPKAD | Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | 100.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | BPKAD | Pengadaan paket perlengkapan kantor | 3 Paket | 181.500.000 | |
| 34. | Pengadaan peralatan gedung kantor | BPKAD | Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | 100.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | BPKAD | Pengadaan Paket peralatan gedung kantor | 42 Paket | 400.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|----------|---------------|--|-------|--|-----------|----------------|--|
| 35. | Pengadaan mebeleur | BPKAD | Jumlah penyediaan mebeleur | 1 Paket | 25.000.000 | Pengadaan mebeleur | BPKAD | Pengadaan paket pengadaan mebeleur | 13 Paket | 100.000.000 | |
| 36. | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | BPKAD | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 Paket | 81.640.000 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | BPKAD | Terpeliharanya gedung kantor BPKAD | 1 Paket | 266.200.000 | |
| 37. | Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur | BPKAD | Jumlah pemeliharaan mebeleur | 1 Paket | 10.000.000 | Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur | BPKAD | Terpeliharanya mebeleur kantor | 124 Paket | 24.200.000 | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | |
| 38. | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BPKAD | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, workshop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah | 20 orang | 20.000.000 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BPKAD | Pengiriman aparatur untuk bimtek, workshop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah | 20 orang | 66.550.000 | |
| | JUMLAH TOTAL | | | | 9.783.718.000 | | | | | 17.795.489.000 | |

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program/Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para pemangku kepentingan, dalam hal ini Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis). **Tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja BPKAD tahun 2020.**

Rincian usulan kegiatan yang masuk dimaksud disajikan pada tabel berikut:
TIDAK ADA USULAN.

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Kebumen

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya mengenai aset daerah, dan saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi aset dan pemeriksaan aset ke Perangkat daerah agar diperoleh laporan aset yang akurat dan akuntabel sehingga akhirnya Kabupaten Kebumen bisa kembali memperoleh opini WTP hasil audit Laporan Keuangan tahun 2018. Selain itu berkait dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, di Kabupaten Kebumen sendiri sudah dibuat Peraturan Bupati Kebumen nomor 20 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual, untuk itu saat ini sedang disempurnakan system pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini penting, karena pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk mengamankan Barang Milik Daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional berikutnya tentang Transaksi Non Tunai/TNT. Transaksi Non Tunai / TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, EDC dan CMS atau sejenisnya.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota angka 2 disebutkan bahwa *“Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi Penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan Pengeluaran daerah yang dilakukan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.”*

Oleh karenanya, untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah daerah, yang didukung oleh Menteri PPN/KBPPN bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala BPKP. Karena itu semua Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional. Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diluar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/KBPPN.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dikeluarkan Surat Bupati Kebumen Nomor 900/2367 tanggal 10 November 2017 tentang Pemberitahuan Transaksi Non Tunai (kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri) angka 2 dan 3 bahwa *“Terhadap pelaksanaan transaksi non tunai akan ditingkatkan secara bertahap dan dimulai tahun 2018, pada tahap awal dibatasi atas transaksi pembayaran di atas Rp.5.000.000,00, “Dalam rangka tertib administrasi akan disusun Peraturan Bupati tentang system pembayaran dan penerimaan non tunai dan akan diperbaharui sesuai tahapan perkembangannya”.* Dan selanjutnya di susun Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pembayaran Pada Pemerintah Kabupaten, Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.”

Manfaat implementasi transaksi non tunai yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi, mencegah

transaksi ilegal (korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*), dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Disamping itu, untuk melaksanakan Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di tahun 2020 akan disusun Analisa Standar Belanja, ini merupakan kegiatan baru yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yaitu Penyusunan Analisis Standar Belanja. Sejalan dengan hal tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, Pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. Disisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 89 huruf e disebutkan bahwa “dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional adalah Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dapat yang diakses melalui *browser web* seperti *Internet Explorer*, *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, dan browser lainnya. Basis data (*database*) yang digunakan dalam Aplikasi OM-SPAN diambil dari aplikasi SPAN utama (care SPAN). Pengambilan data tidak dilakukan secara realtime, namun dengan jeda waktu tertentu. Jika terdapat perbedaan informasi yang disajikan oleh Aplikasi OM-SPAN dengan yang dihasilkan oleh Aplikasi SPAN, maka yang

dipergunakan adalah informasi yang dihasilkan dari Aplikasi SPAN. Hal ini berdasarkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di lingkungan Departemen Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa;

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Nomor PER-4/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran DAK Fisik Dana Desa pada Ditjen Perbendaharaan.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2020, tema pembangunan tahun 2020 adalah “Pemantapan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Prioritas pembangunan tahun 2020 antara lain :

Pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;

Pemanfaatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan;

Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;

Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas;

Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BPKAD Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di BPKAD mendukung prioritas ke-5 (Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih), dengan prioritas Peningkatan akuntabilitas sistem

pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan, serta arah kebijakannya itu meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

Prioritas ini mendukung Misi 6 Bupati Kebumen Tahun 2016-2021 yaitu “Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan BPKAD, tujuan dan sasaran rencana kerja BPKAD tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPKAD Tahun 2020

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah) | Target 2020 |
|---|--|---|-------------|
| Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | Opini BPK atas LKPD | WTP |
| | Meningkatnya Layanan Kinerja BPKAD | Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD | 95% |
| | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah | Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 93,25% |

PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENCAPAIAN IKU DAERAH DAN IKU PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja BPKAD Tahun 2020 mencakup 8 program yang terdiri dari 39 kegiatan yang terkait program, dengan uraian sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Pengembangan Data/informasi

a. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan Pengendalian Kas Daerah

Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga

Kegiatan Penyusunan Raperda tentang APBD

Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kegiatan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah

Kegiatan Penyusunan KUAPBD dan PPAS

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-Lain Daerah

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Belanja Langsung
 Kegiatan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
 Kegiatan Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten/Kota
 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kegiatan Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Sosial

Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 6
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

| Indikator Sasaran | Realisasi 2017 | 2018 | | | Target Akhir RPJMD 2021 | % Capaian trhdp Target Akhir RPJMD |
|---------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| Opini BPK atas LKPD | WTP atas LKPD 2017 | WTP | WTP atas LKPD 2018 | 100% | WTP | WTP |

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, Kabupaten Kebumen kembali meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). Ini merupakan kali kelima Kabupaten Kebumen memperoleh Opini WTP, setelah sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2015, 2017 dan sekarang 2018.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Untuk mencapai sasaran diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja OPD pencapaian sasaran 2 dan sasaran 3 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

| Indikator Sasaran | Realisasi 2017 | 2018 | | | Target Akhir RPJMD 2021 | % Capaian trhd Target Akhir RPJMD |
|--|----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| Prosentase capaian kinerja pelayanan OPD | 95,37% | 93% | 94% | 94% | 96% | 96% |

Persentase capaian kinerja pelayanan OPD daerah diukur dari terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya jumlah sarana prasarana kantor yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah dan tersedianya dokumen database perangkat daerah serta jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

| Indikator Sasaran | Indikator Program | Realisasi 2017 | 2018 | | | Target Akhir RPJMD 2021 | % Capaian trhd Target Akhir RPJMD |
|---|--|----------------|--------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | | |
| Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset | | 95,37% | 92,30% | 95,50% | 95,50% | 95% | 95% |
| | Capaian realisasi belanja | | 90 | 92,46 | 92,46 | 90 | 90 |
| | Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah Tepat Waktu | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu | | 80 | 90 | 90 | 83 | 83 |
| | Capaian Realisasi Pendapatan | | 100 | 99,54 | 99,54 | 100 | 100 |
| | Jumlah SKPD yang mengirim SPJ Fungsional Tepat Waktu | | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | Tersedianya data rekonsilia | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | si pelaporan keuangan daerah | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 BPKAD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada lampiran renja ini;

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1.20.05 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | | | | | | | | | | 9.783.718.000 | 13.003.668.000 | | | |
| 2.1.20.05 | Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | 18.000.000 | 21.175.000 | | | |
| 2.14.1.20.05 | Statistik | | | | | | | | | | 18.000.000 | 21.175.000 | | | |
| 2.14.1.20.05.15 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | | | | Tersedianya dokumen database perangkat daerah | 1 Dokumen | | | | | 18.000.000 | 21.175.000 | | | |
| 2.14.1.20.05.15.01 | Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Data base pengelolaan keuangan dan aset daerah | 1 Dokumen | Jumlah data base pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung tersedianya dokumen data base perangkat daerah | 1 Dokumen | 18.000.000 | 21.175.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.1.20.05 | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | 4.884.750.000 | 8.803.192.000 | | | |
| 4.01.1.20.05 | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | 28.500.000 | 35.000.000 | | | |
| 4.01.1.20.05.15 | Program pengembangan data/informasi | | | | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah | 5 Dokumen | | | | | 28.500.000 | 35.000.000 | | | |
| 4.01.1.20.05.15.02 | Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah berupa Perubahan Renstra 2016-2021, Renja, Perubahan Renja, RKA/DPA, LKPJ/LPPD dan LKJIP | 5 Dokumen | Jumlah dokumen perencanaan di OPD BPKAD sebagai bagian dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah | 5 Dokumen | 28.500.000 | 35.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05 | Keuangan | | | | | | | | | | 4.601.250.000 | 8.368.192.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|
| 4.02.1.20.05.17 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | Capaian Realisasi belanja; Capaian Penerbitan Dokumen keuangan daerah tepat waktu ; Capaian SKPD Tertib Administrasi AsetTepat Waktu; | 90%; 100%; 83%; | | | | | | 3.913.250.000 | 7.555.932.000 | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|---|--|--|--|-------------------|--------|---|-----------|--|-----------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 4.02.1.20.05.17.01 | Penyusunan analisa standar belanja | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja untuk tercapainya penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1.000.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.02 | Penyusunan standar satuan harga | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang indeks Standarisasi Harga | 1 Dokumen | Jumlah Peraturan Bupati tentang indeks standarisasi harga untuk tercapainya penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 1 Dokumen | 81.250.000 | 110.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.06 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Rancangan APBD dan Raperbup APBD untuk capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 2 Dokumen | 420.000.000 | 500.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.08 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan APBD untuk capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 2 Dokumen | 350.000.000 | 430.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.10 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD LKPD, Perda, Perbup dan Laporan Semesteran | 3 Dokumen | Jumlah dokumen pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD LKPD, Perda, Perbup dan Laporan Semesteran untuk capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 3 Dokumen | 370.000.000 | 410.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.16 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset | 2 Dokumen | Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset dengan capaian OPD tertib administrasi aset tepat waktu | 2 Dokumen | 445.000.000 | 770.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.21 | Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah pemasangan plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanda batas tanah pemda | 50 Buah | Jumlah pemasangan plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanda batas tanah pemda | 50 Buah | 248.000.000 | 939.230.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|---|--|--|-------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | Jumlah unit Asuransi Kendaraan Dinas yang terbayar | 3 Unit | Jumlah unit Asuransi Kendaraan Dinas yang terbayar | 3 Unit | | | | | |
| 4.02.1.20.05.17.26 | Penyusunan KUAPBD dan PPAS | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen KUA PPAS murni dan perubahan | 4 Dokumen | Jumlah Dokumen KUA PPAS murni dan KUA PPAS perubahan dengan capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu | 4 Dokumen | 158.000.000 | 263.538.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.30 | Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah obyek intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah | 3 Obyek | Jumlah obyek intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan lain-lain daerah dengan capaian realisasi pendapatan | 3 Obyek | 94.000.000 | 929.704.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.36 | Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan dilaksanakannya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD dan Penatausahaan BOS dan BLUD | 12 Bulan | Jumlah bulan dilaksanakannya sinkronisasi data keuangan OPD dan Pengesahan SPJ Fungsional OPD dan Penatausahaan BOS dan BLUD | 12 Bulan | 229.000.000 | 466.025.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.40 | Pengelolaan Belanja Langsung | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah dokumen data penatausahaan keuangan daerah belanja langsung dan pembinaan bendahara OPD | 1 Dokumen | Jumlah dokumen data penatausahaan keuangan daerah belanja langsung dan pembinaan bendahara OPD dengan capaian realisasi belanja | 1 Dokumen | 845.000.000 | 1.225.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.17.41 | Pengelolaan Belanja Tidak Langsung | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah dokumen pengelolaan gaji dan penerbitan SP2D belanja tidak langsung | 1 Dokumen | Jumlah dokumen pengelolaan gaji dan penerbitan SP2D belanja tidak langsung dengan capaian realisasi belanja | 1 Dokumen | 273.000.000 | 512.435.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.18 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | | | | Jumlah SKPD yang mengirim SPJ fungsional tepat waktu | 216 SKPD | | | | | 688.000.000 | 812.260.000 | | | |
| 4.02.1.20.05.18.05 | Penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah | 2 Dokumen | Jumlah Dokumen Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan/Aset Daerah Perbup Sewa dan Pinjam pakai aset BMD, dan menindaklanjuti PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah | 2 Dokumen | 165.000.000 | 200.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|---|--|--|-------------------------|--|----------|--|----------|---|----------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 4.02.1.20.05.18.07 | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD | 198 OPD | Jumlah OPD di evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan OPD, terevaluasinya DPA OPD dan tersosialisasinya Pedoman Penyusunan APBD | 198 OPD | 223.000.000 | 358.705.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.02.1.20.05.18.08 | Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Sosial | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi hasil dan pembiayaan | 120 SPM | Jumlah SPM Pencairan bantuan keuangan/bantuan sosial hibah bagi hasil dan pembiayaan | 120 SPM | 300.000.000 | 253.555.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 4.05.1.20.05 | Fungsi Lainnya | | | | | | | | | | 255.000.000 | 400.000.000 | | | |
| 4.05.1.20.05.20 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | Tersedianya data rekonsiliasi pelaporan keuangan daerah | 12 bulan | | | | | 255.000.000 | 400.000.000 | | | |
| 4.05.1.20.05.20.15 | Pengendalian Kas Daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan pengelolaan dana transfer APBD dan transfer daerah dengan capaian realisasi belanja | 12 Bulan | Jumlah bulan pengelolaan dana transfer APBD dan transfer daerah dengan capaian realisasi belanja | 12 Bulan | 255.000.000 | 400.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.1.20.05 | Program Pendukung Operasional SKPD | | | | | | | | | | 4.880.968.000 | 4.179.301.000 | | | |
| 5.01.1.20.05 | Program Pendukung Operasional SKPD | | | | | | | | | | 4.880.968.000 | 4.179.301.000 | | | |
| 5.01.1.20.05.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | | | | | 1.307.738.000 | 2.343.661.000 | | | |
| 5.01.1.20.05.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan surat menyurat untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 3.960.000 | 7.687.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan telekomunikasi air dan listrik | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan telekomunikasi air dan listrik | 12 Bulan | 200.000.000 | 585.640.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan perawatan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | Jumlah bulan perawatan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 117.360.000 | 331.619.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|--------|---|----------|---|----------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 5.01.1.20.05.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan jasa pengelola kegiatan | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan jasa pengelola kegiatan untuk mendukung kelancaran administrasi keuangan | 12 Bulan | 407.898.000 | 512.435.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor dan jumlah bulan penyediaan honor petugas kebersihan | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor dan jumlah penyediaan honor petugas kebersihan | 12 Bulan | 79.216.000 | 87.846.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan perbaikan peralatan kerja untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 68.000.000 | 114.200.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 60.000.000 | 109.808.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan penggandaan cetakan dan penjilidan | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan penggandaan cetakan dan penjilidan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 50.000.000 | 109.808.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 9.902.000 | 21.962.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran | 12 Bulan | 9.902.000 | 21.962.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------|---|-------------|---|-------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 5.01.1.20.05.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan jamuan rapat dan jamuan tamu | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan jamuan rapat dan jamuan tamu untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 120.000.000 | 175.692.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 150.000.000 | 219.615.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.19 | Penunjang Administrasi Perkantoran | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan honor PTT | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan honor PTT | 12 Bulan | 19.500.000 | 23.425.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.01.20 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah | 12 Bulan | Jumlah bulan penyediaan akomodasi dan perjalanan dinas dalam daerah untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran | 12 Bulan | 12.000.000 | 21.962.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai | 100% | | | | | 3.553.230.000 | 1.769.090.000 | | | |
| 5.01.1.20.05.02.05 | pengadaan Kendaraan dinas/operasional | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 34 Unit | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 34 Unit | 3.236.590.000 | 750.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| | | | | | | | --- Jumlah kendaraan dinas untuk BKPPD | --- 2 Unit | --- Jumlah kendaraan dinas untuk BKPPD | --- 2 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlah kendaaan dinas untuk eselon II | --- 5 Unit | --- Jumlah kendaaan dinas untuk eselon II | --- 5 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlh kendaraan dinas untuk Inspektorat | --- 2 Unit | --- Jumlh kendaraan dinas untuk Inspektorat | --- 2 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlah kendaraan dinas untuk Dinas kearsipan dan perpustakaan | --- 2 Unit | --- Jumlah kendaraan dinas untuk Dinas kearsipan dan perpustakaan | --- 2 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlah kendaraan dinas untuk kecamatan | --- 13 Unit | --- Jumlah kendaraan dinas untuk kecamatan | --- 13 Unit | | | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp) | Prakiraan Maju (Rp) | Keterangan | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------|--------|---|------------|--|------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan | Prioritas Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| | | | | | | | --- Jumlah kendaraan untuk DPU (1 hilux double gardan, 1 supra x, 1 viar, 2 KLX) | --- 5 Unit | --- Jumlah kendaraan untuk DPU (1 hilux double gardan, 1 supra x, 1 viar, 2 KLX) | --- 5 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlah Kendaraan untuk Dishub 1 Unit Hilux | --- 1 Unit | --- Jumlah Kendaraan untuk Dishub 1 Unit Hilux | --- 1 Unit | | | | | |
| | | | | | | | --- Jumlah Kendaraan dinas roda 2 untuk BAPPENDA | --- 4 Unit | --- Jumlah Kendaraan dinas roda 2 untuk BAPPENDA | --- 4 Unit | | | | | |
| 5.01.1.20.05.02.07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | 100.000.000 | 199.650.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.02.09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | Jumlah penyediaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | 100.000.000 | 400.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.02.10 | Pengadaan mebeleur | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah penyediaan mebeleur | 1 Paket | Jumlah penyediaan mebeleur untuk bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 25.000.000 | 100.000.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 Paket | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 Paket | 81.640.000 | 292.820.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |
| 5.01.1.20.05.02.29 | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah pemeliharaan mebeleur | 1 Paket | Jumlah pemeliharaan mebeleur | 1 Paket | 10.000.000 | 26.620.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-------------------------|---|--------|--|----------|--|----------|------------|------------|--|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01.1.20.05.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya | 20 ASN | | | | | 20.000.000 | 66.550.000 | | | |
| 5.01.1.20.05.05.03 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah | BPKAD KABUPATEN KEBUMEN | | | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, workshop dan seminar terkait pengelolaan keuangan daerah | 20 Orang | Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya | 20 Orang | 20.000.000 | 66.550.000 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | KSB | P1 |

| NO | VERIFIKATOR | TTD |
|----|-------------|-----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 198903 2 006

BAB V PENUTUP

Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat berarti bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Selain itu resiko atau *cost* yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga *cost*-nya.

Rencana Kerja PD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2020. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari BPKAD, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPKAD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKAD tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Kebumen tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati BPKAD Kabupaten Kebumen serta peran aktif seluruh stakeholder BPKAD Kabupaten Kebumen.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Dra. Hj. DYAH WORO PALUPI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641015 198903 2 006